

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNTUK PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK DI PUSKESMAS MELOLO KABUPATEN SUMBA TIMUR

Anggreany Dean R. Manu¹, Erni E. Pua Upa², Rina Waty Sirait³

¹*Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM Universitas Nusa Cendana*

²⁻³*Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan, FKM Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: deananggreany23@gmail.com

Abstract

Maternal mortality ratio in East Nusa Tenggara fluctuated from year to year. In 2016 the maternal mortality rate was 131 per 100,000 live births, in 2017 it was 120 per 100,000 live births and in 2018 it was 161 per 100,000 live births. Health efforts are needed to overcome these problems. One of the efforts made is the provision of a Special Allocation Fund (BOK Funds) to improve the quality and access to health services aimed at reducing maternal, infant and child mortality, overcoming nutritional problems, controlling disease and environmental health, especially in areas that have many health problems. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the use of BOK funds for the MCH program at Puskesmas Melolo, East Sumba Regency in 2020. This research is a descriptive qualitative research. There were 4 informants in this study, namely the head of the puskesmas, the person in charge/manager of the BOK funds, the KIA coordinator and the person in charge for the health of UKS/youth. Data were collected by conducting in-depth interviews and observations and analyzed qualitatively. The results showed that the absorption of BOK funds for the MCH program at the health center reached 80% or Rp180,760,000 from the target of Rp. 225,950,000 that was set at 100%. MCH efforts have been carried out in accordance with the technical guidelines for the use of BOK funds. The use of BOK funds for the MCH program at puskesmas has been effective. It is expected that each program manager will use the funds in accordance with the existing technical guidelines.

Keywords: Effectiveness, Maternal and Child Health, Health Operational Assistance.

Abstrak

Angka Kematian Ibu di Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Tahun 2016 angka kematian ibu sebesar 131 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2017 sebesar 120 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2018 sebesar 161 per 100.000 kelahiran hidup. Maka diperlukan upaya-upaya kesehatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemberian Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, mengatasi permasalahan gizi, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan terutama daerah yang memiliki banyak masalah kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana BOK untuk program KIA di Puskesmas Melolo Kabupaten Sumba Timur tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan penelitian ini berjumlah empat orang yaitu kepala puskesmas, penanggung jawab dana BOK, koordinator program KIA dan penanggung jawab kesehatan UKS/remaja. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan dana BOK untuk program KIA di puskesmas mencapai 80% atau Rp180.760.000 dari target Rp 225.950.000 yang ditetapkan yaitu 100%. Upaya KIA sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pemanfaatan dana BOK. Pemanfaatan dana BOK untuk program KIA di puskesmas sudah efektif. Diharapkan kepada setiap pengelola program untuk memanfaatkan dana sesuai dengan juknis yang ada.

Kata Kunci: Efektivitas, Kesehatan Ibu dan Anak, Bantuan Operasional Kesehatan.

Pendahuluan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bidang kesehatan merupakan salah satu sumber pendanaan daerah untuk melaksanakan

desentralisasi guna mendorong pertumbuhan kesehatan, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan terjangkau, inklusif, dan berkualitas tinggi.¹ Pemerintah daerah harus mengembangkan kegiatan dan memberi dukungan yang memadai dalam peningkatan penyelenggaraan dan kemudahan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan kesehatan, agar perencanaan kesehatan dapat dilaksanakan sesuai permasalahan dan juga kebutuhan kesehatan daerah. Termasuk di dalamnya upaya pemberdayaan masyarakat, dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Puskesmas mengkoordinasikan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan serta upaya lainnya di bidang kesehatan yang terkoordinasi untuk jangka panjang.²

DAK Bidang Kesehatan merupakan dana yang berasal dari APBN. Dana ini dianggarkan untuk peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, mengatasi permasalahan gizi, pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan khususnya bagi orang miskin, masyarakat di daerah tertinggal, pedesaan, perbatasan, serta daerah yang mempunyai masalah kesehatan. Sedangkan BOK adalah bagian dari DAK yang diperuntukkan bagi daerah dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan prioritas nasional yang bersifat daerah dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.³ Penggunaan dana BOK terbesar diperuntukkan bagi program KIA disusul program gizi. Pada prinsipnya fokus pemanfaatan dana BOK adalah untuk mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).⁴

Masalah AKI merupakan salah satu perhatian Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan di bidang kesehatan. Target SDGs di antaranya: penurunan AKI sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian neonatal sebanyak 12 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita sebanyak 25 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.⁵ Angka kematian ibu di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti pada tahun 2016 sebesar 131 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2017 sebesar 120 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2018 sebesar 161 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan kasus tersebut maka diperlukan upaya-upaya kesehatan untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁶

Upaya pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB adalah dengan meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan dengan upaya prioritas yaitu peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan *antenatal care* (ANC).⁷ Berdasarkan laporan Puskesmas se-Kabupaten Sumba Timur, rendahnya cakupan K1 dan K4 berdampak terhadap tingginya AKB dan AKI di Kabupaten Sumba Timur. AKI di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2018 sebesar 7 per 100.000 kelahiran hidup dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 10 per 100.000 kelahiran. Sedangkan AKB pada tahun 2018 sebesar 43 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 37 per 1.000 kelahiran hidup.⁸

Kegiatan puskesmas yang memperoleh distribusi anggaran dari pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk upaya kesehatan promotif preventif dan rehabilitatif. Salah satu upaya pemerintah yaitu membiayai bidang kesehatan dengan mengalokasikan dana BOK atas dasar penilaian bahwa biaya operasional puskesmas yang relatif kecil serta kurang memperhatikan kegiatan promosi dan pencegahan kesehatan yang berakibat pada kurang optimalnya keberhasilan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif di daerah.³ Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa angka penyerapan yang tinggi di puskesmas efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak dengan pengertian yang jelas tentang juknis BOK, pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan laporan, melibatkan pelaksana dalam menyusun *Plan of Action* (PoA) serta evaluasi terhadap kegiatan yang telah

dilaksanakan.⁹ Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana BOK untuk Program KIA di Puskesmas Melolo Kabupaten Sumba Timur.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Melolo Kabupaten Sumba Timur dari bulan Oktober sampai November 2020. Informan dalam penelitian ini sebanyak empat orang yaitu kepala puskesmas, penanggung jawab dana BOK, koordinator KIA dan penanggung jawab kesehatan UKS/remaja yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan diambil berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti, yang dilihat dari ciri atau sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi dengan menggunakan pedoman wawancara. Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan pengolahan data dilakukan secara bertahap yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan simpulan/verifikasi. Hasil penelitian disajikan dalam tabel dan narasi. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana dengan Nomor: 2020154 – KEPK Tahun 2020.

Hasil

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Melolo merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pembangunan kesehatan di Kecamatan Umalulu. Puskesmas Melolo memiliki 10 wilayah kerja dengan jumlah penduduk 18.153 jiwa. Adapun informan yang terlibat meliputi kepala puskesmas (1), penanggung jawab BOK dan program imunisasi (2), bidan koordinator penanggung jawab program KIA (3), dan penanggung jawab program UKS dan anak remaja (4). Semua merupakan tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas Melolo Kabupaten Sumba Timur.¹⁰

1. Penyerapan Dana BOK untuk KIA

Penyerapan Dana BOK di puskesmas dikatakan baik apabila sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam juknis yakni harus mencapai 100%. Di Puskesmas Melolo, penyerapan Dana BOK untuk program KIA sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 belum mencapai 100%. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Untuk penyerapan Dana BOK sendiri kita puskesmas belum pernah mencapai 100%, aaa untuk KIA punya saja tahun lalu (2019) kita penyerapannya hanya 74%, sedangkan tahun ini sampai bulan ini sudah mencapai 80% untuk penyerapannya.” (Informan 2).

Semua kegiatan di puskesmas sudah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Petunjuk Teknis pemanfaatan Dana BOK yang ada. Akan tetapi pada pelaksanaannya ada kegiatan yang tidak dilakukan karena kegiatan tersebut tidak pernah ada kasus atau masalahnya di puskesmas tetapi pertanggungjawabannya tetap mengikuti PoA yang ada berdasarkan juknis. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Kita lakukan kegiatan sama dengan juknis yang ada, karna nanti kalau beda kita dapat tegur dari atas, makanya semua kegiatan itu sudah sesuai juknis. Aaa... tapi ada kegiatan yang tidak kita lakukan aaa dana nya ada untuk kegiatan tersebut hanya kan kita sesuaikan lagi keadaan di lapangan kebutuhannya seperti apa jadi dana dari kegiatan itu kita pake untuk tutup kegiatan yang sedang berjalan begitu.” (Informan 3)

Dana BOK berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas untuk kegiatan promotif dan preventif. Tujuan khusus Dana BOK ini adalah untuk melakukan upaya kesehatan promotif preventif di dalam dan luar gedung puskesmas khususnya program KIA. Dalam hal ini, Dana BOK sudah sangat membantu pencapaian program dan kinerja di Puskesmas Melolo. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Setiap tahun mutu pelayanan kesehatan ini meningkat, apa lagi ada dana BOK eee pencapaian program meningkat terus bisa lihat dari kita punya target SPM, biar belum 100% setidaknya ada peningkatan.” (Informan 2)

Sisa Dana BOK biasanya dimasukkan dalam kas puskesmas dengan memasukkan permohonan ke dinas kesehatan untuk kegiatan BOK pada tahun berikutnya atau sebagai dana persiapan jika ada kegiatan tambahan dan juga pembelian alat tulis kantor. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Itu kita kasih masuk di kas puskesmas untuk kegiatan BOK di tahun depannya lagi, tapi kalau tiba-tiba mendadak kekurangan dana, kita pakai untuk tutupi kegiatan yang lain dengan membuat permohonan ke Dinkes.” (Informan 2)

2. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Pelaksanaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Melolo Kabupaten Sumba Timur sudah sesuai dengan juknis yang ada yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis pemanfaatan Dana BOK Nomor 3 Tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan hasil telaah dokumentasi berupa tabel jenis kegiatan KIA di puskesmas. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Kalo program KIA sudah sama dengan juknis sama seperti yang kita suda omong di awal kita semua itu berpatokan pada juknis yang ada, aaa... semua kegiatan yang kita buat sudah sesuai juknis yang ada walaupun ada yang beda paling beda-beda tipis tapi tetap sama dengan juknis yang ada, sama dengan PoA.” (Informan 3)

Untuk upaya KIA, ada program yang jenis kegiatannya tidak dilakukan tetapi ada pada PoA dan ada dananya. Hal ini terjadi karena kegiatan yang ada pada juknis dianggap tidak efektif untuk puskesmas karena tidak pernah terdapat kasus sehingga dana untuk kegiatan tersebut digunakan untuk menutup dana pada anggaran yang lainnya. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Ia ada yang kita lakukan di lapangan itu berbeda dengan di juknis. Aaa... ada alasan ya tidak sesuka kita otak-atik apa yang sudah diberikan dari atas. Kita bikin begitu karena memang kita lihat kondisi di lapangan seperti apa dan juga apa yang dibutuhkan. Dari pada dananya tidak terpakai lebih baik kita gunakan untuk kegiatan yang lebih penting to seperti itu, aaa... kalo SPJ yaa nanti kita tetap masukkan sesuai dengan yang di PoA seperti itu, setiap tahun juga kita buat begitu aman-aman saja kok lagian kan semua kegiatan tetap berjalan.” (Informan 3)

3. Efektivitas Pemanfaatan Dana BOK untuk KIA

Gambaran keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya perlu ditindaklanjuti untuk mengetahui manfaat dan dampak dihasilkan oleh program tersebut sehingga diperlukan penilaian efektivitas suatu program. Untuk menilai suatu program efektif

atau berhasil atau tidak tergantung hasil evaluasi yang dilakukan. Di Puskesmas Melolo pemanfaatan Dana BOK untuk upaya KIA sudah efektif karena telah mendekati target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya Dana BOK sangat membantu puskesmas dalam pelaksanaan program dan peningkatan capaian program khususnya KIA tiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Kalau ditanya soal efektif atau tidaknya biasanya tergantung evaluasi yang di lakukan, biasa evaluasi ada yang setiap bulan, ada yang triwulan, ada juga yang tahunan. Aaa.. tapi sejauh ini Dana BOK sudah lumayan baik untuk puskesmas karna membantu untuk setiap program dalam menjalankan setiap kegiatannya. sudah dapat dikatakan efektif karna sudah mendekati target 100 % yang kita tetapkan.” (Informan 1)

Realisasi pemanfaatan dana BOK untuk program KIA di Puskesmas Melolo di targetkan sebesar 100%, namun pemanfaatan dananya belum 100%. Realisasi dana BOK untuk program KIA sebesar 80% yaitu Rp 180.760.000 dari dana sebesar Rp 225.950.000. Dengan pemanfaatan sebesar 80% sudah termasuk efektif karena telah mendekati/mencapai target. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Targetnya sudah pasti kita mau sesuai juknis yaa yaitu 100%, tapi sampai saat ini realisasi nya baru mencapai 80%.” (Informan 1)

“Realisasi pemanfaatan untuk KIA memang belum pernah mencapai 100%, aa untuk tahun ini saya rasa sudah ya karna sudah mencapai 80%.” (Informan 3)

Pemanfaatan Dana BOK yang dilakukan di Puskesmas Melolo Kabupaten Sumba Timur telah sesuai dengan kriteria dalam juknis penggunaan dana BOK. Penggunaan dana BOK untuk upaya pengembangan dan kesehatan masyarakat esensial paling sedikit 60% dari jumlah dana BOK yang diperoleh puskesmas, dan sisanya untuk dukungan manajemen dan upaya kesehatan lainnya maksimal 40% dari alokasi BOK yang diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Ya kalo untuk pemanfaatan Dana BOK sudah pasti kita ikuti juknis yang ada adi tidak mungkin mau lari jauh dari juknis, karena ini menyangkut dana harus ada pertanggung jawaban pelaksanaannya nanti aaa... Ia sebelum kita pake dana yang ada kan kita sudah melewati tahap perencanaan apa-apa saja kegiatan yang akan kita laksanakan dan sudah pasti apa yang telah kita rencanakan secara bersama-sama melalui lokakarya mini itu yang di laksanakan. Ia artinya rencana untuk KIA di awali dari puskesmas, sehingga puskesmas buat PoA aaa jadi semua rencana dari puskesmas kemudian di bawa ke dinas lalu diverifikasi, dan semua program kita rencanakan sesuai kebutuhan, jadi apa yang diajukan oleh puskesmas masih diperiksa lagi kegiatan mana-mana saja yang disetujui untuk dilakukan di puskesmas.” (Informan 1)

Secara administratif, pemanfaatan dana BOK di Puskesmas Melolo sudah sesuai dengan perencanaan untuk program KIA sesuai dengan petunjuk teknis tentang Dana BOK yang sudah ada setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Jadi untuk program yang menggunakan dana BOK itu kan sudah ada ya dia punya penggunaan dana itu seperti apa aaa... di dalam juknis itu to, na kalo untuk KIA nya

kita di puskesmas sini sudah pasti ikut apa yang ada di juknis dengan melihat juga di lapangan seperti apa, tidak mungkin di lapangan butuh A misalnya kita kasihnya B.” (Informan 3)

Untuk menghasilkan kegiatan yang sesuai rencana dan mencapai target, dana BOK harus dimanfaatkan sesuai perincian dana yang sudah ditetapkan, karena rencana kegiatan yang dibuat sudah dihitung pengeluarannya sesuai kebutuhan. Agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pada tiap kegiatan, pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan perincian dana yang sudah ditetapkan. Secara aktual, di Puskesmas Melolo masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan PoA misalnya anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan akan tetapi dalam pertanggungjawaban tetap dibuat sesuai dengan PoA yang ada. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Ya memang tidak semua kegiatan itu pas dengan perincian dana yang di PoA, tapi kan semua kegiatan tetap terlaksana berdasarkan dana yang tersedia tiap upaya, karna tiap upaya kesehatan itu kan banyak kegiatannya, semua kegiatan tetap dilaksanakan. Kalo laporan pertanggung jawabannya kita buat berdasarkan PoA saja, paling target-target sarannya yang kita buat sesuai di lapangan.” (Informan 2)

Pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak sebagian berjalan tidak sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya, terutama dalam hal akurasi waktu dan target karena anggaran belum ada, waktu pelaksanaan program kurang tepat, proses pencairan anggaran berlangsung bertahap dan kompleks, dan biasanya terkait dengan masalah administratif. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Kalo mau jalankan kegiatan sudah pasti membutuhkan dana, tapi dana terlambat cair karna memang prosesnya juga agak ribet, jadi banyak program yang tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan biasanya sudah mau memasuki akhir tahun baru cair, dan biasanya kita tetap lakukan biarpun dana belum cair aaa bikin memang itu program yang akan dilaksanakan.” (Informan 1)

Kendala dalam pemanfaatan Dana BOK di Puskesmas Melolo dikarenakan pencairan dana yang terlambat. Program sudah selesai dilaksanakan baru kemudian dana cair. Kendala lain juga pada keterlambatan petugas dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan sehingga evaluasi kadang tidak dilakukan karena SPJ yang masuk terlambat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Kendalanya di ketersediaan dana, karena dana ini turun setelah kita melakukan kegiatannya dulu, bukan dananya dulu yang cair baru kita melakukan kegiatan, sehingga agak susah buat kita melakukan kegiatan jika dana pribadi yang ada terbatas. Selain itu, petugas kesehatannya kurang sigap dalam melaksanakan kegiatan dan membuat laporannya, kadang laporan itu tunggu saya teriak-teriak dulu baru mau dibuat, sehingga evaluasi kegiatan itu kadang tidak dilakukan karna suda terlalu lama laporan baru selesai.” (Informan 3)

Pembahasan

1. Penyerapan Dana BOK

Daya serap dana BOK adalah kemampuan untuk menyerap dana BOK berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa penyerapan dana BOK untuk program KIA belum mencapai target yaitu 100%.

Penyerapan dana BOK untuk program KIA di puskesmas sudah mencapai 80% yaitu Rp 180.760.000 dari dana sebesar Rp 225.950.000. Hal ini dikarenakan terkait pencairan dana yang terlambat dan juga pandemi COVID-19 sehingga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu bahwa sejak tahun 2014 hingga 2016 pemanfaatan dana BOK di Puskesmas Kota Serang selalu mencapai 100% dan lebih dari 30% dana dialokasikan untuk program KIA setiap tahun. Akan tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan pencapaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya kunjungan antenatal K4 yang justru semakin menunjukkan penurunan dari target yang ditetapkan (75%) sehingga perlu dievaluasi.¹¹ Dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOK yaitu daya serap BOK dikatakan baik apabila sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam juknis, dan realisasi penyerapan Dana BOK harus 100%. Jika tidak terealisasi 100%, maka dana harus dikembalikan ke kas negara atau disampaikan permohonan kepada dinas kesehatan untuk melakukan kegiatan tambahan dengan sisa dana tersebut.³

Penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan dana BOK tersebut tidak sesuai dengan perincian dana yang sudah direncanakan dalam PoA terjadi karena petugas pelaksana tidak melihat berapa target dana yang harus dikeluarkan setiap kali melakukan kegiatan, sehingga sering kali mengalami perbedaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Puskesmas Teladan juga menjelaskan hal yang sama bahwa penggunaan dana BOK tidak sesuai dengan perincian dana yang sudah direncanakan karena petugas kesehatan tidak melihat berapa besar dana sasaran yang akan dikeluarkan untuk setiap kegiatan.¹² Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tentang Petunjuk Teknis BOK tahun 2019 dinyatakan bahwa pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan PoA yang telah dibuat untuk mengefisienkan penggunaan dana BOK. Jika penggunaan dana BOK tidak sesuai dengan perincian dana yang sudah ditetapkan dalam PoA, ini dapat menyebabkan pemanfaatan dana BOK tidak efektif dalam melakukan pelayanan.³

Penelitian ini juga menemukan bahwa sisa dana yang tidak terpakai disimpan dalam kas puskesmas untuk kebutuhan yang mendesak atau keperluan kegiatan tambahan atau untuk membeli alat tulis kantor dengan cara mengajukan permohonan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOK tahun 2020 menyatakan bahwa realisasi pemanfaatan dana BOK harus 100%. Jika tidak 100%, maka sisa anggaran yang tidak digunakan tersebut harus dikembalikan ke kas negara, kecuali puskesmas mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan tambahan dengan dana yang tersisa.³

2. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Upaya kesehatan ibu dan anak merupakan upaya di bidang kesehatan yang terkait dengan pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan anak balita serta anak prasekolah.⁷ Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan dana BOK di puskesmas sangat membantu puskesmas dalam menjalankan program dalam mencapai sasaran dan target keberhasilan program. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan terdahulu yang menunjukkan bahwa hasil cakupan upaya program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang meliputi K1, K4, deteksi risiko tinggi, persalinan oleh tenaga kesehatan, kunjungan neonatus (KN), kunjungan nifas (KF), serta kematian ibu dan bayi dipengaruhi oleh penerapan kebijakan pemanfaatan BOK untuk upaya KIA di Puskesmas.⁹

Penelitian ini menemukan bahwa untuk program KIA target yang ditetapkan adalah 100%. Untuk jenis kegiatannya sudah sesuai dengan juknis yang ada, namun pada realisasi program belum mencapai 100%. Penelitian sebelumnya di Puskesmas Teladan menunjukkan bahwa semua kegiatan promotif dan preventif yang didanai dana BOK telah dilaksanakan 100%, namun target SPM belum sepenuhnya terpenuhi karena terdapat kendala dalam pelaksanaannya.¹³ Dalam penelitian ini diketahui bahwa ada program yang jenis kegiatannya

terdapat dalam juknis namun tidak dilakukan karena penanggung jawab program merasa kegiatan tersebut tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Walaupun demikian, pihak puskesmas tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, dan laporan pertanggungjawaban tetap dibuat sesuai dengan PoA yang ada. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa masalah sebenarnya bukanlah kurangnya dana, melainkan konsistensi program yang tidak sesuai harapan, serta adanya program yang dianggap perlu oleh pemerintah pusat tetapi sebetulnya menjawab kebutuhan daerah dalam pelaksanaannya.¹³

3. Efektivitas Pemanfaatan Dana BOK

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, karena efektivitas adalah representasi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi efektivitas program penting dilakukan untuk memastikan sejauh mana dampak dan manfaat dari program.¹⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana BOK untuk program KIA sudah efektif di Puskesmas karena keberadaannya membantu puskesmas dalam mencapai target. Hal tersebut didasari oleh fakta adanya peningkatan target dan capaian pada puskesmas walaupun pemanfaatan Dana BOK untuk program KIA belum pernah mencapai 100% dan setiap tahunnya ada peningkatan. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa walaupun pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Talang Ratu Palembang belum berhasil atau belum efektif namun berkontribusi dalam pencapaian tujuan perencanaan.¹⁵

Berdasarkan hasil telaah dokumen didapati bahwa persentase realisasi pelaksanaan kegiatan KIA di puskesmas sebesar 90% dan hampir mendekati/mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Realisasi pemanfaatan dana BOK untuk program KIA di puskesmas sebesar 80% yaitu Rp 180.760.000 dari dana sebesar Rp 225.950.000. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program KIA dalam pemanfaatan dana BOK sudah efektif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang pencapaian target program KIA bidang kesehatan. Penelitian ini menemukan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sudah dibuat dalam rencana usulan kegiatan (RUK) yang disusun tahun 2019 untuk tahun 2020. Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang dibuat selama tahun berjalan diketahui sudah berdasarkan juknis yang ada dan berdasarkan kebutuhan puskesmas. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor No. 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan.³

Dana BOK harus dimanfaatkan sesuai perencanaan yang telah disepakati agar dapat mencapai target. Untuk menghasilkan kegiatan yang sesuai rencana dan target, Dana BOK harus dimanfaatkan sesuai perincian dana yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dana pada setiap kegiatan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pemanfaatan Dana BOK di Puskesmas Melolo masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai perincian dana yang terdapat dalam PoA tetapi dalam laporan pertanggungjawabannya tetap dibuat sesuai dalam PoA. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan jumlah target dan sasaran di lapangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Puskesmas Kartini yang menyatakan bahwa perencanaan yang sudah ditetapkan selama setahun dinilai kurang efisien karena sering kali terjadi ketidaksesuaian antara program yang dijalankan dengan kondisi nyata masyarakat pada saat itu.¹⁶

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketersediaan sumber daya khususnya kesiapan anggaran berpengaruh signifikan terhadap realisasi setiap program. Kegiatan KIA di Puskesmas Melolo tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini dikarenakan pencairan anggaran kegiatan membutuhkan waktu yang lama untuk sesuai tahapan administratif. Implikasinya, program akan ditunda atau penanggung jawab berinisiatif

menggunakan dana pribadi untuk menjalankan kegiatan agar tidak tertunda. Pada akhirnya hal ini berdampak pada tumpang tindihnya pelaksanaan kegiatan. Hal ini kemudian diperburuk oleh kurangnya tenaga teknis, baik secara jumlah maupun mutu. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa BOK untuk kegiatan manajemen puskesmas secara keseluruhan masih kurang baik, dikarenakan banyaknya kendala yang didapatkan oleh pengelola BOK puskesmas seperti keterlambatan pencairan dana.¹⁷ Penelitian sebelumnya yang dilakukan pada puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe juga menemukan keterlambatan pencairan dana. Program-program tetap dijalankan meskipun minim anggaran.¹³ Di Puskesmas Melolo, pencairan dana BOK yang terlambat menyebabkan petugas harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu untuk melaksanakan program. Selain itu, keterlambatan masuknya Surat Pertanggungjawaban kegiatan (SPJ) juga menjadi faktor penghambat lainnya. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian di Puskesmas Teling Atas yang menunjukkan bahwa kegiatan BOK baik kesehatan prioritas maupun penunjang upaya kesehatan telah sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak optimal, yaitu tidak cukup dana dan keterlambatan pencairan dana yang menghambat pelaksanaan kegiatan.¹⁸

Penelitian ini juga menemukan bahwa penanggung jawab BOK di puskesmas mempunyai tugas lebih selain mengatur pengelolaan dana BOK. Penanggung jawab BOK juga ikut serta dalam pelaksanaan BOK dan pembuatan laporan. Petugas kesehatan harus berperan ganda karena kurangnya tenaga kesehatan dalam pelaksanaan. Akibatnya sering tidak fokus dalam mengelola pengeluaran anggaran tiap kegiatan. Temuan penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan tugas ganda yang diperoleh petugas kesehatan menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak efektif untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan.¹⁹ Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian di Kabupaten Bintan tahun 2011 dan 2012 yang menyatakan bahwa pelaksanaan BOK di Kabupaten Bintan belum efektif dikarenakan terlambatnya sosialisasi BOK ke puskesmas-puskesmas sehingga penyerapan dana BOK tidak bisa dilakukan di awal tahun sesuai juknis.²⁰

Kesimpulan

Penyerapan Dana BOK untuk Program KIA di puskesmas sudah mendekati/mencapai target 80% dari target 100% yang telah ditetapkan. Upaya KIA di Puskesmas Melolo sudah dilaksanakan sesuai dengan juknis yang ada dan mendekati/mencapai target yang ditentukan yaitu 100% dan upaya KIA rata-rata mencapai 90%. Pemanfaatan Dana BOK untuk Program KIA di puskesmas sudah efektif karena telah mendekati/mencapai target tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Daftar Pustaka

1. Presiden RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Internet]. 33 Indonesia; 2004 p. 1–68. Available from: <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU33-2004PerimbanganKeuanganLengkap.pdf>
2. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat [Internet]. 43 Indonesia; 2019 p. 1–168. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138635/permenkes-no-43-tahun-2019>
3. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

- [Internet]. 3 Indonesia; 2019 p. 2–116. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111708/permenkes-no-3-tahun-2019>
4. Presiden RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [Internet]. 23 Indonesia; 2014 p. 1–460. Available from: https://bulelengkab.go.id/assets/bankdata/undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah_449747.pdf
 5. Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019 [Internet]. Kementerian Kesehatan. Jakarta; 2010. Available from: <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>
 6. Dinas Kesehatan NTT. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 [Internet]. Dinas Kesehatan. Kupang; 2018. Available from: <https://www.google.com/search?q=Profil+Kesehatan+Provinsi+Nusa+Tenggara+Timur+Tahun+2018&oq=Profil+Kesehatan+Provinsi+Nusa+Tenggara+Timur+Tahun+2018&aq=s=chrome..69i57.903809j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
 7. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinaan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual [Internet]. 97 Negara Indonesia; 2014 p. 1–119. Available from: <https://www.kebijakanidsindonesia.net/id/dokumen-kebijakan?task=download.send&id=644&catid=17&m=0>
 8. Dinas Kesehatan NTT. Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT [Internet]. Kupang; 2020. Available from: <https://dinkes.nttprov.go.id/index.php/publikasi/publikasi-data-dan-informasi>
 9. Aridewi A, Kartasurya MI, Sariatmi A. Analisis Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. *Manaj Kesehat Indones* [Internet]. 2013;01(01):32–40. Available from: <https://media.neliti.com/media/publications/113582-ID-analisis-pemanfaatan-bantuan-operasional.pdf>
 10. Puskesmas Melolo. Profil Kesehatan Puskesmas Melolo Tahun 2019. Melolo; 2019.
 11. Laeliah SN, Nadjib M. Hubungan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan Peningkatan Cakupan Kunjungan Antenatal K4 di Puskesmas Kota Serang Tahun 2014-2016. *Kebijak Kesehat Indones* [Internet]. 2017;6(03):115–26. Available from: https://www.researchgate.net/publication/322081282_Hubungan_Pemanfaatan_Dana_Bantuan_Operasional_Kesehatan_BOK_dengan_Peningkatan_Cakupan_Kunjungan_Antenatal_K4_di_Puskesmas_Kota_Serang_Tahun_2014-2016
 12. Wahyuni S. Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam Program Promotif dan Preventif di Puskesmas Teladan Tahun 2018 [Internet]. Universitas Sumatera Utara; 2018. Available from: <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15034>
 13. Timbu AC. Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe [Internet]. Universitas Hasanuddin; 2017. Available from: <https://docobook.com/kia256229562f608cf014aedcbe9f45759b93278.html>
 14. Sulaeman, Sutisna E. Manajemen Kesehatan Teori dan Praktik di Puskesmas. Surakarta; 2014.
 15. Maratama. Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun

- 2012 (Studi di Puskesmas Talang Ratu Palembang). Talang Ratu Palembang; 2012. 1–20 p.
16. Mahfuzhah U. Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam Program Promotif dan Preventif (Studi Kasus di Puskesmas Kartini Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar) [Internet]. Universitas Sumatera Utara Medan; 2016. Available from: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63764/Cover.pdf;sequence=7>
 17. Wahyuningsih. Implementasi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 [Internet]. Universitas Hasanuddin Makassar; 2018. Available from: <http://103.195.142.59/opac/detail-opac?id=40634>
 18. Mokodaser RR. Analisis Implementasi Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Teling Kota Manado. 2013;1–8. Available from: <https://fkm.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Jurnal-raindy-r.-mokodaser.pdf>
 19. Untari J, Manahati Zebua dan AYL. Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap Pencapaian Kinerja Program MDGs : Studi Kasus Puskesmas Kawangu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014. 2014; Available from: <http://medika.respati.ac.id/index.php/Medika/article/view/15>
 20. Husni F. Efektivitas Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Dan Tahun 2012 [Internet]. Universitas Indonesia; 2012. Available from: https://www.researchgate.net/publication/290248176_The_Analysis_Effectiveness_Implementation_of_Minapolitan_Area_Development_Policy_in_Bintan_Regency_Riau_Archipelago_Province